

# SKRIPSI

## PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU SULAWESI

FAHRI PRATAMA PUTRA



DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019



# SKRIPSI

## PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU SULAWESI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**FAHRI PRATAMA PUTRA**  
**A11115327**



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2019**



SKRIPSI

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN  
INVESTASI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI  
PULAU SULAWESI**

disusun dan diajukan oleh:

**FAHRI PRATAMA PUTRA  
A11115327**

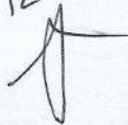
telah dipertahankan dalam ujian skripsi

Makassar, 11 November 2019

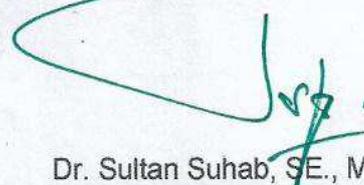
Pembimbing I



Dr. Agussalim, SE., M.Si.  
NIP 19670817 199103 1 006

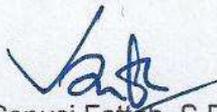
*noo yitam  
13/12-2019*  


Pembimbing II



Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si.  
NIP 19691215 199903 1 002

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si.  
NIP 19690413 199403 1 003



# SKRIPSI

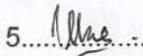
## PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU SULAWESI

disusun dan diajukan oleh:

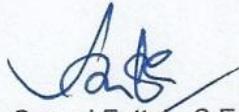
**FAHRI PRATAMA PUTRA**  
A11115327

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 07 Januari 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Agussalim, SE., M.Si.	Ketua	1. 
2	Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si.	Sekretaris	2. 
3	Prof. Dr. Nursini, SE., MA.	Anggota	3. 
4	Dr. Hj. Indraswati Tri Abdi Reviane, SE., MA.	Anggota	4. ....
5	Dr. Munawwarah S. Mubarak, SE., M.Si.	Anggota	5. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
Dr. Sanusi Fattan, S.E., M.Si.  
NIP 19690413 199403 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fahri Pratama Putra

NIM : A11115327

Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sulawesi**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 13 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



Fahri Pratama Putra



## PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT atas limpahan berkah dan karunia-Nya , serta segala kemudahan dan atas izin-Nya pula penulis mampu merampungkan skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana. Shalawat dan salam selalu tucurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan suri tauladan dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik dan lancar tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis bapak Burhanuddin dan mama Nurpahmi yang telah mencurahkan segala cinta dan kasih sayangnya yang tak terhingga, atas doa dan restu mereka yang tiada henti, serta dukungan moril maupun materil yang dengan jerih payahnya selalu berusaha dipenuhi. Merekalah yang menjadi alasan dalam setiap langkah penulis untuk selalu menjadi yang terbaik, menjadi anak yang bisa dibanggakan meski tidak pernah akan sebanding dengan apa yang mereka berikan, semoga selalu dilimpahkan kesehatan. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih atas seluruh bantuannya kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si. selaku ketua departemen Ilmu Ekonomi

serta seluruh dosen. Terima kasih atas segala bantuan, nasehat yang diberikan, serta kesempatan mencuri ilmunya sehingga penulis dapat



menyelesaikan studi. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang.

3. Bapak Drs. H. Madris, SE., DPS., M.Si. selaku penasehat akademik penulis. Terima kasih untuk segala perhatian, pengertian, nasehat dan keramahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang.
4. Bapak Dr. Agussalim , SE., M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing II. Terima kasih untuk segala upaya dan arahnya kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bimbingan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang.
5. Ibu Prof. Dr. Nursini, SE., MA, Ibu Dr. Hj. Indraswati Tri Abdireviane, MA, dan Ibu Munawwarah S. Mubarak, SE., M.Si. selaku dosen penguji. Terima kasih telah meluangkan waktunya, serta kritik dan saran yang membangun dalam menyempurnakan skripsi ini untuk lebih baik, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang.
6. Saudara-saudaraku “ANTARES 2015” yang sama-sama masuk dan sama-sama berjuang. Terkhusus Saudara-saudara KEMA ANTARES 2015 terima kasih atas nongkrong-nongkrongnya, ceritanya, perjuangannya yang menemani penulis untuk menjalani proses pengembangan diri dalam masa perkuliahan semoga kita tetap dalam lindungan-Nya, diberikan kesehatan dan umur panjang.
7. Mamat D’Masiv, Abon Besari, Bayu J Rocks, Zul Avenged Sevenfold, Kak Imran Irama dan Jason Rafly teman bermain-main musik, teman belajar, terima kasih atas segala pengalaman yang orang lain tidak bisa berikan



kepada penulis, semoga kita tetap dalam lindungan-Nya, diberikan kesehatan dan umur panjang.

8. Crew “ENAK TOTAL” terima kasih telah meluangkan tenaga dan pikiran demi menjaga nama baik angkatan semoga kita tetap dalam lindungan-Nya, diberikan kesehatan dan umur panjang.

9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi (Himajie) kakanda dan adik-adik, terima kasih atas seluruh pelajaran, pengalaman, dan tanggung jawab yang telah diberikan sebagai bagian dari pembentukan jati diri penulis. Jayalah Himajie!

10. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi rezim 2018-2019, Presidium ku Pitto dan Alm. Putri Syfa yang selalu mengingatkan dan memberi saran penulis untuk menjadi ketua yang baik, teman-teman seangkatan Wulan, Nunu, Pitti, Ita, Gobel, Bayu, Ana, Velop, Bhia yang ingin meluangkan waktu, menunda sarjananya demi berjuang bersama, dan adik-adik Sphere dan Erudite baik yang tergabung dalam kepengurusan maupun yang sempat menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan agenda pada rezim ini, terima kasih penulis ucapkan yang sebesar-besarnya semoga kita tetap dalam lindungan-Nya, diberikan kesehatan dan umur panjang.

11. Keluarga besar tapi sederhana, saudara-saudara dari Kreatifitas seni ekonomi (KreseK) wadah bagi penulis mencurahkan segala bentuk keinginan, dorongan, cita-cita dalam bidang seni, terima kasih atas pengalaman yang tidak ada duanya, salam kreatifitas!

12. Pengurus Kreatifitas seni ekonomi episode 2, terkhususnya teman bersusah-

h Alif, Ria, dan Widi, yang sabar membangun keluarga kecil ini menjadi  
:v, dan sampai skripsi ini jadi dan penulis sedikit lagi sarjana, *belumpi*



*poto studio anak-anakaaa*. Terima kasih atas segalanya semoga kita tetap dalam lindungan-Nya, diberikan kesehatan dan umur panjang.

13. Pengurus Kabinet Hitam Putih periode 2017-2018 pengurus paling *santuyy* terima kasih atas pelajaran yang sangat berharga yang dapat membentuk penulis menjadi lebih baik, semoga kita tetap dalam lindungan-Nya, diberikan kesehatan dan umur panjang.
14. KKN Reguler Sinjai Borong Gel. 102, Bonto Tenggara Squad (BTS), dan penduduk Bonto tengnga terima kasih atas pengalaman KKN yang tidak ada duanya, tempat penulis bisa mendapatkan pandangan baru, keluarga baru. semoga kita tetap dalam lindungan-Nya, diberikan kesehatan, umur panjang dan bisa bertemu lagi.
15. Seluruh sahabat, dosen, keluarga, pegawai, serta mace mala, terima kasih telah memberikan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi yang tidak sempat tersebutkan semuanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Atas semua kekurangan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya berasal dari penulis, semoga dapat berguna bagi diri penulis, almamater, bangsa, dan agama. Aamiin.

Makassar, 13 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,

Fahri Pratama Putra



## ABSTRAK

### Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sulawesi

Fahri Pratama Putra  
Agussalim  
Sultan Suhab

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan melalui variabel intervening yaitu pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Pulau Sulawesi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan sumber-sumber lainnya berupa data panel yang terdiri dari data runtut waktu dari tahun 2006 hingga 2018 dan data cross sectional yang diperoleh dari 6 Provinsi di Pulau Sulawesi. Data yang digunakan adalah data alokasi belanja modal, investasi swasta, laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan gini ratio pada masing-masing provinsi di Pulau Sulawesi yang dianalisis menggunakan model analisis regresi simultan (Simultaneous Equation Model). Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode pengamatan, alokasi belanja modal pemerintah secara langsung berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sulawesi, sedangkan melalui indeks pembangunan manusia alokasi belanja modal pemerintah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil lain menunjukkan bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Pulau Sulawesi.

**Kata Kunci :** Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Ketimpangan Pendapatan



## **ABSTRACT**

### ***The Effect of Government Expenditure and Investment on Income Inequality in Island of Sulawesi***

Fahri Pratama Putra  
Agussalim  
Sultan Suhab

This study aims to analyze the effect of government expenditure and investment on income inequality through intervening variables, namely economic growth and the human development index in island of Sulawesi. The study uses secondary data obtained from Badan Pusat Statistik and other sources in the form of panel data consisting of time series from 2006 to 2018 and cross sectional obtained from 6 Provinces in Island of Sulawesi. The data used are data on capital expenditure allocation, private investment, economic growth rate, human development index and gini ratio in each Province in Island of Sulawesi that is analyzed using the Simultaneous Equation Model. The result show during the period of this research, allocation of government capital expenditure directly has a positive effect on income inequality, while indirectly it does not effect on income inequality in Island of Sulawesi. Other result show that investment does not effect on income inequality either directly or indirectly through economic growth dan human development index in Island of Sulawesi.

**Keywords** : Government Expenditure, Investment, Economic Growth, Human Development Index, Income inequality



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>PRAKATA</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Tinjauan Teoritis .....	10
2.1.1 Ketimpangan Pendapatan.....	10
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia.....	15
2.1.4 Belanja modal Pemerintah .....	17
2.1.5 Investasi.....	19
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	20
2.2.1 Belanja modal Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	20
2.2.2 Belanja modal Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi .....	22
2.2.3 Belanja modal Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui IPM .....	23
2.2.4 Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	24
2.2.5 Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi.....	25



2.2.6 Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui IPM.....	26
2.3 Penelitian Terdahulu .....	27
2.4 Kerangka Konseptual.....	31
2.5 Hipotesis Penelitian.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Ruang Lingkup Penelitian .....	33
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.3 Metode Analisis Data .....	34
3.4 Definisi Operasional .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1 Perkembangan Variabel Penelitian di Pulau Sulawesi .....	39
4.1.1 Perkembangan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sulawesi.....	39
4.1.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sulawesi....	42
4.1.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sulawesi .....	44
4.1.4 Perkembangan Investasi di Pulau Sulawesi.....	45
4.1.5 Perkembangan Belanja Modal Pemerintah di Pulau Sulawesi .....	49
4.2 Uji Kesesuaian .....	52
4.3 Pengujian Hipotesis.....	53
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian .....	57
4.4.1 Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapat.....	57
4.4.2 Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>



## DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu .....	31
4.1 Perkembangan Gini Ratio di Pulau Sulawesi .....	39
4.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sulawesi .....	43
4.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sulawesi .....	44
4.4 Perkembangan Investasi di Pulau Sulawesi .....	46
4.5 Perkembangan Belanja Modal Pemerintah di Pulau Sulawesi .....	50
4.6 Hasil Regresi .....	53
4.7 Hasil Estimasi Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung .....	55



## DAFTAR GAMBAR

1.1 Perkembangan Gini Ratio pada 6 Provinsi di Pulau Sulawesi .....	4
1.2 Perkembangan Belanja Modal Pemerintah pada 6 Provinsi di Pulau Sulawesi.....	5
1.3 Perkembangan Investasi pada 6 Provinsi di Pulau Sulawesi .....	7
2.1 Kurva Lorenz .....	12
2.2 Kerangka Konseptual .....	31
4.1 Diagram Analisis Jalur Antar Variabel .....	58



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Indeks Gini Ratio di Pulau Sulawesi .....	75
2. Data Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sulawesi .....	75
3. Data Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sulawesi .....	76
4. Data Total Investasi (PMDN dan PMA) di Pulau Sulawesi .....	76
5. Data Alokasi Belanja Modal di Pulau Sulawesi .....	77
6. Hasil LN Data Investasi di Pulau Sulawesi .....	77
7. Hasil LN Data Alokasi Belanja Modal Pemerintah di Pulau Sulawesi .....	78
8. Hasil Analisis Regresi .....	78
9. Hasil Analisis Model Fit Summary .....	81



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai sebuah negara yang terdiri dari ribuan pulau, perbedaan karakteristik wilayah menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindari oleh Indonesia. Karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, maka tidak mengherankan bila pola pembangunan ekonomi wilayah di Indonesia tidak seragam. Ketidakseragaman ini akan berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada gilirannya akan mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Pertumbuhan ekonomi sering kali diikuti dengan perubahan struktur pendapatan, terutama bagi negara yang sedang berkembang. Masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia ialah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Pemerataan distribusi pendapatan merupakan hal yang penting di dalam sebuah Negara. Pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) merupakan dua masalah besar dibanyak Negara sedang berkembang (NSB), tidak terkecuali di Indonesia. Ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai

tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar  
sistem dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses pertumbuhannya.



Karenanya, tidaklah mengherankan ketimpangan itu pastinya selalu ada, baik itu di negara miskin, negara sedang berkembang, bahkan negara maju sekalipun. Hanya saja yang membedakan adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing negara tersebut.

Sofyan (2010) mengemukakan bahwa kegagalan pemerataan distribusi pendapatan tidak hanya berpengaruh buruk terhadap bidang perekonomian saja, tetapi juga sosial, politik dan keamanan. Ketimpangan pendapatan akan menyebabkan tumbuhnya kecemburuan sosial dan kemiskinan yang nantinya dapat berujung pada resiko terbesar seperti kerusuhan dan gerakan separatis. Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Seringkali di negara-negara berkembang dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal daripada tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan.

Ketimpangan juga dapat dipicu oleh perbedaan pembangunan antar daerah. Adanya disparitas antar daerah semakin diperparah akibat tidak efisiennya pemerataan daerah seperti mobilitas tenaga kerja, upah, dan investasi (Piotr, 2009). Ketimpangan pendapatan yang tinggi tidak hanya dipandang sebagai masalah, tetapi juga sebagai sumber timbulnya masalah baru. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutannya. Ketimpangan yang tinggi dapat menurunkan

han karena rumah tangga yang berpendapatan tinggi merampas  
uan rumah tangga berpendapatan rendah untuk tetap sehat dan



mengakumulasi modal fisik dan manusia. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya investasi dalam pendidikan karena anak-anak miskin berakhir di sekolah berkualitas rendah dan kurang mampu melanjutkan ke perguruan tinggi. Akibatnya, produktivitas tenaga kerja bisa lebih rendah daripada mereka yang memiliki pendapatan yang tinggi. Todaro dan Smith juga menjelaskan bahwa untuk menganalisis ketimpangan dapat diukur dengan menggunakan *gini ratio* dimana angkanya berkisar antara 0-1 yang digunakan sebagai ukuran ketimpangan agregat suatu wilayah.

Menurut Arsyad (2010) tujuan utama dari pembangunan ialah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan. Teori *Trickel Down Effect* juga menjelaskan bagaimana kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya.

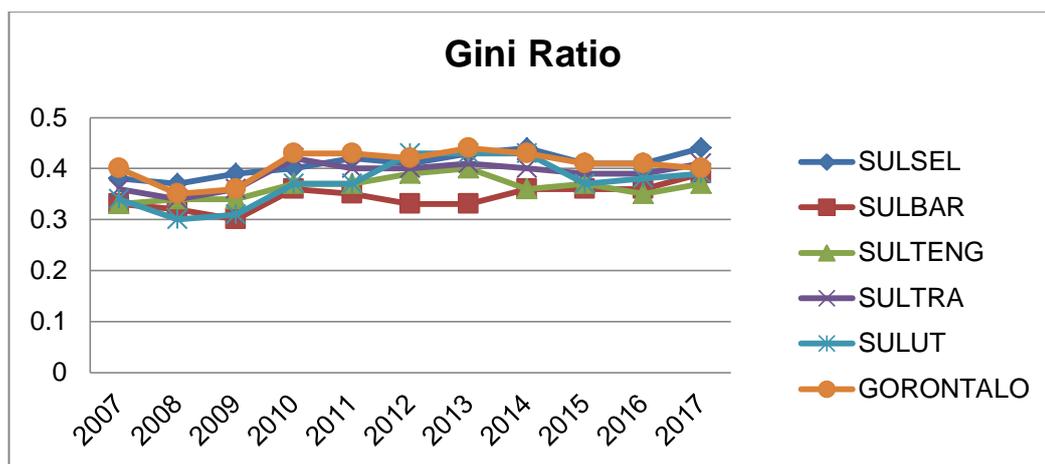
Pembangunan ekonomi suatu negara dinyatakan berhasil jika terjadinya pertumbuhan ekonomi diiringi dengan berkurangnya ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan terjadi apabila sebagian besar penduduk memperoleh pendapatan yang rendah dan pendapatan yang besar hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan merupakan dua unsur yang penting dalam proses pembangunan. Akan tetapi,

ini menunjukkan bahwa diantara kedua aspek tersebut seringkali terjadi



*trade off* antara satu dan lainnya, yaitu bilamana mendahulukan pemerataan maka akan cenderung memperlambat proses pertumbuhan (Sjafrizal, 2008).

Sebagai salah satu pulau di Indonesia, Pulau Sulawesi dengan 6 provinsinya didukung oleh data Produk Domestik Regional Bruto mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa provinsi di pulau lain Indonesia. Hal ini disebabkan karena lapangan usaha utama seperti sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi tetap berperan sebagai pendorong utama. Tetapi, walaupun memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, ketimpangan pendapatan di beberapa provinsi di Pulau Sulawesi dalam beberapa tahun terakhir masuk dalam 10 provinsi di Indonesia dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang paling tinggi. Hal ini juga dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik (2007 – 2017)

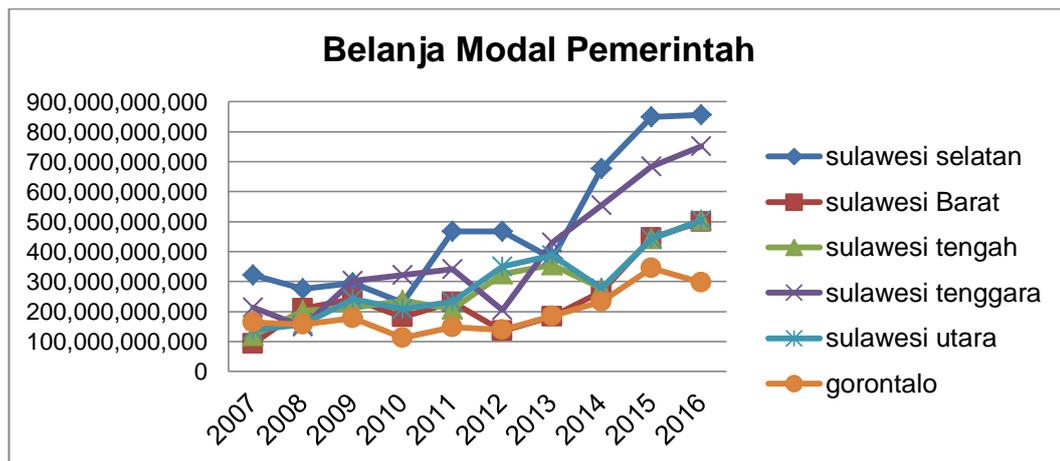
Gambar 1.1 Perkembangan *Gini ratio* pada 6 provinsi di Pulau Sulawesi

Klasifikasi pemerataan berdasarkan Koefisien Gini (KG) merupakan ukuran ketidakmerataan agregat yang memiliki nilai antara 0 (kemerataan sempurna) sampai dengan 1 (ketidakmerataan sempurna); bila nilai KG dari 0,50-0,70 berarti ketidakmerataan tinggi, bila KG



berkisar antara 0,36-0,49 berarti ketidakmerataan sedang, dan bila KG berkisar 0,20-0,35 berarti ketidakmerataan rendah.

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan *Gini Ratio* pada 6 provinsi di Pulau Sulawesi memiliki kecenderungan (*trend*) yang stagnan dalam periode 2007 hingga 2017 yang cenderung berada dalam klasifikasi ukuran ketidakmerataan sedang yaitu berkisar 0,36 - 0,49. Pada tahun 2010, gini rasio mengalami peningkatan untuk setiap provinsi dari tahun sebelumnya, Sulsel mencapai angka 0,4 dari 0,39, Sulbar dari angka 0,3 mencapai 0,36, Sulteng mencapai angka 0,37 dari sebelumnya 0,34, Sultra pada angka 0,42 dari 0,36, sulut mencapai angka 0,37 dari sebelumnya 0,31, dan Gorontalo mencapai angka 0,43 dari tahun sebelumnya 0,31. Perkembangan *gini ratio* pada beberapa provinsi di Pulau Sulawesi yang kurang signifikan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pengeluaran belanja modal pemerintah dan investasi.



Sumber : Badan Pusat Statistik (2007 – 2017)

Gambar 1.2 Perkembangan belanja modal pemerintah pada 6 provinsi di Pulau Sulawesi



Salhab dan Soedjono (2012) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja modal bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek-proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, jumlah belanja modal pemerintah pada tahun 2009 mengalami peningkatan pada setiap provinsi di Pulau Sulawesi, seperti di Sulbar pengeluaran pemerintah meningkat menjadi Rp. 241.804.107.000 dan *gini ratio* mengalami penurunan menjadi 0.30 sedangkan di Sulsel pengeluaran pemerintah meningkat menjadi Rp. 295.862.668.000 tetapi *gini ratio* juga meningkat menjadi 0.39 begitupula provinsi lainnya.

Secara teori, peningkatan jumlah belanja modal pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat *gini ratio*, namun berdasarkan data yang diperoleh sebaliknya. Jumlah belanja modal pemerintah pada setiap provinsi di pulau Sulawesi mengalami peningkatan dan *gini ratio* juga mengalami peningkatan pada beberapa provinsi di Pulau Sulawesi. Pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam mengelola dan mengembangkan sektor publik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika pemerintah banyak melakukan pengeluaran yang berorientasi ke sarana dan prasarana atau infrastruktur publik maka sektor-sektor perekonomian pun akan saling bergerak dalam mempermudah kegiatan ekonomi.

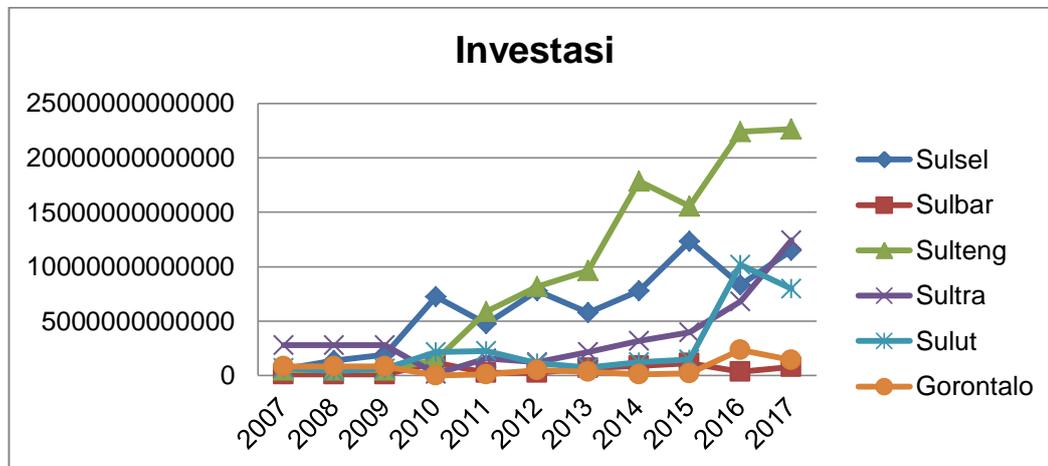
Begitupula sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang baik bagi setiap manusia bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah.

Peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah disektor tersebut juga akan

berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia yang dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia atau indeks pembangunan manusia (IPM). Semakin tinggi IPM



maka akan semakin tinggi pula tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi. Permasalahan yang terjadi ialah ketika IPM pada tiap daerah berbeda, hal ini akan menjadikan IPM sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan.



Sumber : Badan Pusat Statistik (2007 – 2017)

Gambar 1.3 Perkembangan Investasi pada 6 provinsi di Pulau Sulawesi

Investasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Investasi menurut Mankiw (2006) ialah komponen GDP (*Gross Domestic Product*) yang mengaitkan masa kini dan masa depan. Menurut data pada tahun 2010 jumlah investasi yang ada pada provinsi di pulau Sulawesi cenderung meningkat tetapi *gini ratio* juga mengalami peningkatan salah satunya yaitu Sulsei, dimana investasi meningkat menjadi Rp. 7.223.070.850.000 tetapi *gini ratio* juga meningkat menjadi 0.40, sedangkan investasi di provinsi Sultra dan Gorontalo pada tahun yang sama mengalami penurunan dan angka *gini ratio*-nya pun meningkat. Investasi dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.



Menurut Aprilianto, Bayu dkk (2014) menunjukkan bahwa adanya investasi yang dilakukan di suatu daerah, baik itu asing (PMA) maupun domestik

(PMDN) akan mengakibatkan penyerapan tenaga kerja sehingga proses produksi menjadi produktif. Investasi asing di dalam masyarakat pertama-tama akan sangat membantu dan menambah kesempatan kerja, sehingga pendapatan masyarakat pun bertambah begitu juga dalam jaringan yang lebih luas dimana akan menambah pendapatan nasional suatu negara. Meratanya investasi di setiap daerah yang dapat dirasakan oleh masyarakat akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga kemudian akan memperkecil kesenjangan pendapatan yang terjadi antar daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dianggap perlu untuk mengadakan penelitian mengenai **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sulawesi”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka akan disajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah alokasi belanja modal pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia?
2. Apakah Investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka akan disajikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh alokasi belanja modal pemerintah daerah terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia pada tahun 2006 hingga 2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia pada tahun 2006 hingga 2018.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya :

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pendapatan pada 6 provinsi di Pulau Sulawesi.
2. Menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya yang bertemakan Ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teoritis

##### 2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

Pemerataan distribusi pendapatan merupakan hal yang penting di dalam sebuah Negara. Pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) merupakan dua masalah besar di banyak negara sedang berkembang (NSB), tidak terkecuali di Indonesia.

Simon Kuznets mengatakan bahwa pola ketimpangan pendapatan seperti *U terbalik*, dimana pada tahap awal pertumbuhan perekonomian, distribusi pendapatan akan sejalan dengan peningkatan GNI (*Gross National Income*) perkapita, tetapi setelah melewati fase tersebut distribusi pendapatan akan membaik seiring dengan peningkatan GNI perkapita. Penjelasan mengapa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi menyebabkan ketimpangan pendapatan, karena sumber pertumbuhan ekonomi dipusatkan pada sektor industri modern yang kesempatan kerjanya terbatas tetapi tingkat upah dan produktivitasnya tinggi. Kemudian dari pertumbuhan sektor industri tersebut akan memberikan efek tumpahan (*trickle down effect*) dimana tidak hanya sektor industri saja yang bertumbuh, melainkan sektor lainnya yang juga ikut bertumbuh. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya pemerataan pendapatan (Todaro,



Ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses pertumbuhannya. Karenanya, tidaklah mengherankan ketimpangan itu pastinya selalu ada, baik itu di Negara miskin, negara sedang berkembang, bahkan negara maju sekalipun. Hanya saja yang membedakan adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing negara tersebut.

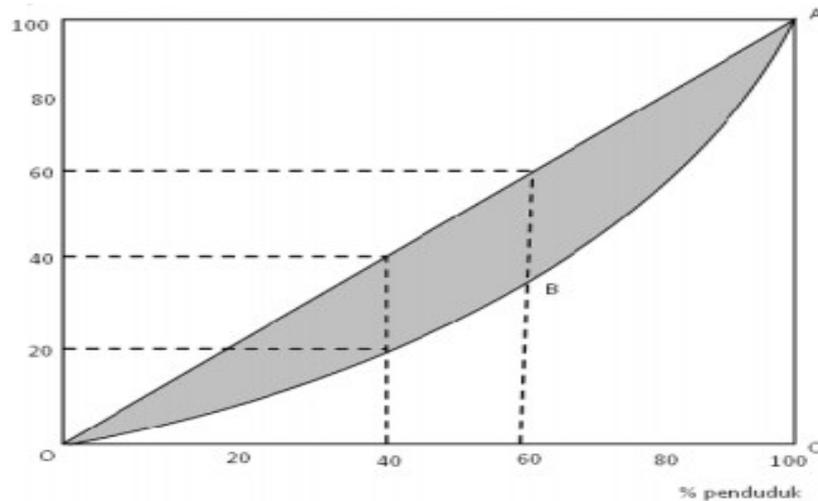
Peningkatan pendapatan perkapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Seringkali di negara-negara berkembang dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal daripada tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan.

Terdapat berbagai macam alat yang dapat dijumpai dalam mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk (*Distribution Income Disparities*). Ketimpangan Pendapatan merupakan ketimpangan relatif pendapatan antar golongan masyarakat yang diukur dengan *Gini Ratio* dan *Kurva Lorenz*. Dari segi penyebabnya, Todaro dalam Suyana Utama (2009) mengatakan, kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan di negara yang sedang berkembang disebabkan oleh: a) pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita, b) ketidakmerataan pembangunan antar daerah, c) inflasi, dimana pendapatan uang bertambah

ak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-  
l) investasi.



Kurva Lorenz secara umum sering digunakan untuk menggambarkan bentuk ketimpangan yang terjadi terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara *persentase* penerima pendapatan dengan *persentase* pendapatan total yang benar-benar mereka terima selama periode tertentu, misalnya, satu tahun.



**Gambar 2.1 Kurva Lorenz**

Kurva Lorenz digambarkan pada sebuah bidang persegi/bujur sangkar dengan bantuan garis diagonalnya. Garis horizontal menunjukkan persentase penduduk penerima pendapatan, sedangkan garis vertikal adalah persentase pendapatan. Semakin dekat kurva ini dengan diagonalnya, berarti ketimpangan semakin rendah dan sebaliknya semakin melebar kurva ini menjauhi diagonal berarti ketimpangan yang terjadi semakin tinggi.

Indeks gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan *kurva Lorenz* dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Indeks gini juga merupakan indikator yang paling populer digunakan untuk mengamati kemiskinan relatif atau ketimpangan

antar kelompok masyarakat. Meskipun indeks gini bukanlah indikator yang paling ideal tentang ketimpangan, namun setidaknya



tidaknya dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan umum dalam pola distribusi pendapatan (Dumairy,1996). Data yang diperlukan dalam penghitungan indeks gini ialah jumlah rumah tangga atau penduduk serta rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya.

### 2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi pada saat ini menjadi salah satu syarat mutlak apabila suatu wilayah ingin mengalami pertumbuhan ekonomi. Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.

Menurut Schumpeter (Boediono, 2002) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan cara-cara atau teknologi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat memperlihatkan *trend* yang meningkat dari tahun ke tahun, karena suatu wilayah dikatakan sejahtera apabila dilihat dari pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan wilayah yang lain. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya diikuti dengan terjadinya pemerataan pendapatan pada masyarakatnya sehingga pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menjadi sangat penting bagi terciptanya kemakmuran suatu wilayah.

Todaro dan Smith (2006) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produksi dalam suatu

bidang secara terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin



lama semakin besar. Ada tiga komponen utama dalam menentukan pertumbuhan ekonomi setiap bangsa, yaitu:

1. Akumulasi modal, meliputi semua bentuk investasi baru yang ditanamkan seperti tanah, peralatan fisik, serta sumber daya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan keterampilan.
2. Pertumbuhan jumlah penduduk, yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi, yang diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan pekerjaan.

Akumulasi modal diperoleh bila sebagian dari pendapatan yang diterima saat ini ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan meningkatkan output dan pendapatan di masa yang akan datang. Pengadaan pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan dan bahan baku akan meningkatkan stok modal (*capital stock*) dan tingkat output yang ingin dicapai. Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus ditopang oleh berbagai investasi penunjang yang disebut dengan investasi infrastruktur sosial dan ekonomi. Pengadaan infrastruktur ini meliputi pembangunan jalan, penyediaan energi listrik, penyediaan sarana air bersih, perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi, dan sebagainya. Keseluruhan dari adanya penyediaan infrastruktur ini sangat dibutuhkan dalam menunjang dan mengintegrasikan aktivitas-aktivitas ekonomi dalam suatu negara.

Selanjutnya terdapat teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Robert Solow dikenal dengan model pertumbuhan Solow (*Solow growth model*). Model ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana persediaan modal, jumlah angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam



perekonomian serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa di suatu negara secara keseluruhan (Mankiw, 2003).

### 2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representative. *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh UNDP. Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia itulah yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam tiga golongan, yaitu:

1.  $IPM < 50$  (rendah)
2.  $50 \leq IPM < 80$  (sedang/menengah)
3.  $IPM \geq 80$  (tinggi)

Sedangkan Todaro dan Smith (2004) mencoba untuk memeringkat semua negara atau daerah dari skala 0 (IPM terendah) hingga 1 (IPM tertinggi) berdasarkan tiga tujuan atau produk akhir IPM yaitu masa hidup yang diukur dengan usia harapan hidup, pengetahuan yang diukur dengan ketimpangan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata sekolah (satu pertiga), standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan riil perkapita disesuaikan dengan disparitas daya beli dari mata uang setiap negara untuk

meningkatkan biaya hidup dan untuk memenuhi asumsi utilitas yang semakin tinggi dari pendapatan. Adapun metode perhitungan Indeks Pembangunan



Manusia (IPM) yang diukur dengan ketiga komponen tersebut merupakan rata-rata sederhana, yakni sebagai berikut :

$$IPM = 1/3 ( Indeks + Indeks + Indeks ) \dots\dots\dots (2.5)$$

$$= 1/3 + 2/3 \dots\dots\dots (2.6)$$

Keterangan:= Lamanya hidup (tahun) = Tingkat Pendidikan; 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama bersekolah) = pendapatan riil per kapita (Rp)= Rata – rata lama bersekolah (tahun)= Angka melek huruf (persen)

Tingkat pendidikan dan kesehatan individu penduduk merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang tinggi menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk itu sendiri yang semuanya bermuara pada aktivitas perekonomian yang maju (Patta, 2012).

Salah satu keuntungan terbesar IPM adalah indeks ini mengungkapkan bahwa sebuah negara dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar dapat berperan relatif lebih kecil dalam pembangunan manusia (Todaro dan Smith, 2004). Todaro dan Smith (2004) menambahkan, IPM menunjukkan dengan jelas bahwa kesenjangan dalam pendapatan lebih besar daripada kesenjangan dalam indikator pembangunan yang lain, paling tidak dalam indikator kesehatan dan pendidikan. IPM juga mengingatkan kita bahwa pembangunan, yang kita maksudkan adalah pembangunan manusia dalam arti luas, bukan hanya dalam bentuk pendapatan

yang tinggi. Kesehatan dan pendidikan bukan hanya input fungsi produksi yang merupakan tujuan pembangunan yang fundamental.



#### 2.1.4 Belanja modal Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah versi Keynes merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa  $Y = C + I + G + (X - M)$ . Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1996).

Teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. (1) Tahap awal, pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (2) Tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. (3) Tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat (Mangkoesoebroto, 2001).

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja,



memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata melalui belanja negara baik itu belanja rutin maupun belanja pembangunan.

Menurut Basri dan Subri (2003), pengeluaran pemerintah itu sangat bervariasi, namun secara garis besarnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang.
2. Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
3. Pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap masa yang akan datang. Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas dan menyebarkan daya beli yang luas.

Kunarjo (1996) mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan antara permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Pengeluaran pemerintah yang terus berkembang mengakibatkan penerimaan negara harus ditingkatkan. Hal ini berarti bahwa pemerintah harus dapat menggali sumber-sumber penerimaannya yang sebagian besar berasal dari pajak.

Walaupun secara keseluruhan pengeluaran pemerintah sangat penting dalam sumbangannya terhadap pendapatan nasional, tetapi yang lebih penting lagi adalah penentuan komposisi dari pengeluaran pemerintah tersebut. Komposisi dari pengeluaran pemerintah merupakan strategi untuk mencapai sasaran dari pembangunan nasional. Berdasarkan komposisi dari pengeluaran

akan terjawab suatu pertanyaan yaitu pengeluaran mana yang kiranya



lebih diprioritaskan apakah pengeluaran rutin harus lebih besar dari pengeluaran pembangunan atau sebaliknya.

### 2.1.5 Investasi

Investasi atau Penanaman Modal merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah modal serta memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi yang terkonsentrasi hanya di beberapa daerah akan menjadi salah satu faktor penyebab adanya ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan, hanya daerah-daerah yang dinilai mendapatkan profit yang menjanjikan yang akan dilirik oleh para investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Investasi menurut Mankiw (2006) adalah komponen GDP (*Gross Domestic Product*) yang mengaitkan masa kini dan masa depan.

Menurut Sultan dan Jamzani (2010) realita di negara berkembang dalam pembangunan terdapat kemajuan yang tidak merata antar daerah atau dengan kata lain terdapat tingkatan ketimpangan antar daerah. Seperti yang terjadi di Indonesia, secara geografis wilayah terdiri atas kepulauan menyebabkan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi ke wilayah pusat pemerintah dan pertumbuhan. Tidak meratanya tingkatan pertumbuhan ekonomi diberbagai daerah disebabkan oleh:

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah.
2. Alokasi investasi yang tidak merata.
3. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah.
4. Perbedaan Sumber Daya Alam (SDA) antar wilayah.
5. Perbedaan kondisi geografis antar wilayah.
6. Kurang lancarnya perdagangan antar propinsi.

Teori Harrod-Domar (dalam Boediono, 1985) adalah perkembangan dari teori makro Keynes jangka pendek menjadi suatu makro jangka



panjang. Aspek utama yang dikembangkan dari teori Keynes adalah aspek yang menyangkut peranan investasi jangka panjang. Dalam teori Keynes, pengeluaran investasi mempengaruhi permintaan penawaran agregat. Harrod-Domar melihat pengaruh investasi dalam perspektif waktu yang lebih panjang. Menurut kedua ekonom ini, pengeluaran investasi tidak hanya mempunyai pengaruh (lewat proses *multiplier*) terhadap permintaan agregat, tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang ini, investasi stok kapital misalnya, pabrik-pabrik, jalan-jalan, dan sebagainya.

Menurut teori Investasi Harrod-Domar (Arsyad, 1997), pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui akumulasi tabungan. Menurut Harrod-Domar, pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Menurut teori Harrod-Domar, untuk meningkatkan laju perekonomian, maka diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok tambahan modal.

## 2.2 Hubungan Antar Variabel

### 2.2.1 Belanja modal Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan

Peran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan fiskal, pada tingkat nasional tergambar melalui APBN dan pada tingkat daerah diwujudkan melalui APBD daerah bersangkutan. Kebijakan

pada skala daerah yang diikuti dengan kebijakan keuangan daerah dan implementasi desentralisasi fiskal sebagai wujud desentralisasi



pembangunan di Indonesia. Pendekatan desentralisasi pada bidang fiskal dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui indikator-indikator makroekonomi seperti; pertumbuhan ekonomi serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di setiap daerah (Sabir, 2015).

Ferry Sutiono (2018) dalam tulisannya menyatakan bahwa belanja modal pemerintah merupakan pembelian sebagian output perekonomian. Pembelian tersebut menjadikan belanja modal sebagai konsumsi pemerintah yang mencerminkan permintaan atas barang modal. Selanjutnya permintaan dalam perekonomian direspon oleh produsen dengan memproduksi barang modal yang diinginkan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi produsen dan dapat pula memberikan upah bagi para pekerja. Pengadaan belanja modal yang bersifat padat karya misalnya pembangunan infrastruktur publik akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga memberikan penghasilan bagi para pekerja.

Lebih lanjut, Ferry mengatakan jika belanja modal juga merupakan investasi pemerintah karena barang yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Apabila barang modal tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, maka belanja modal secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi dalam jangka panjang pula. Sedangkan untuk output belanja modal dalam bentuk barang publik (*public goods*) dapat digunakan untuk mendorong efisiensi produktivitas, perdagangan, dan memperlancar akses pemerataan kesempatan berusaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan peningkatan pendapatan

kat diharapkan akan mendorong perekonomian ke arah penciptaan kerja baru sehingga dapat memberikan penghasilan khususnya bagi



masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka ketimpangan pendapatan juga akan menurun (Ferry Sutiono, 2018).

### **2.2.2 Belanja modal Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi**

Peran pemerintah dalam mengatur pengeluarannya merupakan instrument penting untuk mengendalikan perekonomian. Banyak ekonom berpendapat bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan endogen (Barro, 1990) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah yang produktif akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan. Salah satu pengeluaran pemerintah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah belanja modal berupa penyediaan infrastruktur seperti listrik, transportasi, pendidikan dan kesehatan, guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sabir, 2015)

Kebijakan APBD merupakan gambaran keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya pada aspek belanja daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan pengeluarannya dalam bentuk belanja daerah yang lebih efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat daerah bersangkutan, terutama pada sektor-sektor pembangunan daerah yang memiliki nilai strategis dalam menciptakan efek multiplier yang tinggi. Untuk itu efisiensi dan efektivitas peran pemerintah menurut Tiebout (1956) dapat dicapai karena pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakatnya, mereka

lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal pemerintah pusat. Korelasi ini juga ditunjukkan oleh Keynes dalam



Mankiw (2007) dan Djohanputro (2008), bahwa belanja modal (investasi sektor publik) akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja melalui *multiplier effect*.

Sedangkan menurut Keynes pengeluaran pemerintah adalah salah satu permintaan agregat yang dimana jika permintaan agregat meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana yang akan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

### **2.2.3 Belanja modal Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui IPM**

Todaro and Smith (2003) dan Van Den Berg (2005), hampir secara seragam menawarkan pengukuran pencapaian tujuan pembangunan ekonomi pada hal-hal yang lebih abstrak, terkait dengan aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat yang lebih fokus menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan manusia. Pemikiran kontemporer mengenai pembangunan telah menempatkan kembali manusia sebagai subyek atau pusat dari proses pembangunan. Dalam konsep tersebut manusia ditempatkan sebagai tujuan akhir, sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sebagai indikator pembangunan manusia, UNDP telah mengembangkan *Human Development Index* (HDI) atau biasa disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sejalan dengan pendekatan *Human capital* dimana pengeluaran atau investasi yang mengacu pada perluasan pendidikan, peningkatan kesehatan dan

s manusia lainnya, dapat meningkatkan produktivitas melalui perbaikan sumber daya manusia, alokasi belanja modal pada setiap daerah dalam



membangun sarana dan sistem pendidikan maupun kesehatan mutlak dibutuhkan, dikarenakan pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar bagi manusia sehingga dapat terlepas dari lingkaran setan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2011).

Menurut Becker (Tarmidzi, 2012) menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan, Becker mengkaji lebih dalam mengenai peran pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa, semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan teori *human capital*, yaitu bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap berkurangnya disparitas pendapatan karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja maka upah juga akan ikut meningkat.

#### 2.2.4 Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Adelman dan Morris dalam Subandi (2016) melihat bahwa yang menyebabkan ketimpangan pendapatan ialah investasi yang lebih banyak pada proyek-proyek padat modal, yang dimana membutuhkan modal yang lebih banyak dan tenaga kerja yang sedikit atau lebih membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas. Hal ini menyebabkan persentase pendapatan modal kerja tambahan lebih besar dibandingkan persentase pendapatan yang didapat dari kerja itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan pengangguran.

Sedangkan menurut Smith dalam bukunya *wealth of nation* berpendapat bahwa investasi ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan akan sepenuhnya diinvestasikan. Smith juga memiliki pandangan bahwa yang dapat

... pembangunan ekonomi meningkat adalah pemumpukan modal yang pemumpukan modal ini akan membuat tingkat upah meningkat. Ini



menandakan bahwa semakin banyak tabungan yang masuk maka akan membuat tingkat investasi semakin tinggi yang membuat banyaknya lapangan kerja yang terbuka untuk masyarakat dan akan membuat ketimpangan pendapatan semakin merata di kalangan masyarakat (Jhingan, 2000).

### **2.2.5 Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi**

Investasi juga akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi. Harrod-Domar memberikan peranan kunci kepada investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Lewat peningkatan kapasitas produksi maka pendapatan dan penawaran agregat akan tercipta. adanya investasi berupa pembelian barang modal dan pelengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian sehingga hal ini dapat meningkatkan PDB riil Indonesia dan dengan demikian akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Tri Handayani, 2011).

Dalam teori Investasi Harrod-Domar (Arsyad, 1997), pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Menurut Harrod- Domar, pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Harrod-Domar menyatakan untuk meningkatkan laju perekonomian, maka diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok tambahan modal. Berdasarkan teori tersebut yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa

adanya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut akan meningkat



karena adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif sehingga ketimpangan pendapatan akan berkurang. Peningkatan investasi akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru, pada tahap selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran sehingga dapat memperkecil angka ketimpangan pendapatan (Adrian Sutawijaya, 2010).

### **2.2.6 Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui IPM**

Investasi juga dapat berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan melalui perbaikan di bidang modal manusia, hal ini dianalogikan seperti investasi konvensional dalam modal fisik. Dimana setelah dilakukan investasi awal, aliran pendapatan yang lebih tinggi dimasa yang akan datang dapat diperoleh dari perluasan pendidikan dan peningkatan kesehatan (Todaro dan Smith, 2011).

Studi tentang investasi sumber daya manusia telah dilakukan oleh Schultz sekitar tahun 1960an. Schultz berpendapat bahwa investasi sumber daya manusia akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya itu menjadi lebih produktif dan merupakan salah satu cara untuk keluar dari perbudakan. Meningkatnya sumber daya manusia ini akan menjadikan manusia memiliki lebih banyak pilihan sehingga akan tercipta peningkatan kesejahteraan. Beberapa kegiatan yang menurut Schultz (1961:8) dapat memperbaiki kemampuan sumber daya manusia adalah pendidikan formal yang paling memiliki hubungan erat dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.



## 2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Periode Analisis	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	I Gusti Ayu Putri Wahyuni, Made Sukarsa, Nyoman Yuliarmi	Pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali	Tahun 2000 sampai 2012	Menggunakan data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan observasi nonpartisipan, serta metode analisis jalur atau <i>path analysis</i>	Pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi, dan Pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif terhadap kesenjangan pendapatan.
2	Meylina Astri, Sri Indah Nikensari, Dr. Harya Kuncara W	Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia	Tahun 2007 hingga 2008	Data yang digunakan adalah data time series dan cross section pada setiap provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah <i>metode statistika indukif</i> (statistika inferensial). Teknik pengambilan menggunakan teknik panel data	Tingkat pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan secara serempak memberikan pengaruh positif dengan ditunjukkan koefisien yang positif pada dua variabel bebas tersebut, sehingga tetap memberikan pengaruh yang signifikan terhadap IPM, meskipun dengan tingkat pengaruh yang rendah.



3	Cliff Laisina, Vecky Masinambow, Wensy Rompas	Pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan terhadap PDRB melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara	Tahun 2002 hingga 2013	Menggunakan analisis jalur (Path Analysis)	Realisasi untuk sektor pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM, sedangkan untuk sektor kesehatan memiliki pengaruh yang tidak signifikan baik secara parsial ataupun secara simultan. IPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB baik diuji secara parsial ataupun secara simultan. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB, baik diuji secara parsial ataupun secara simultan, sedangkan di sektor kesehatan memiliki pengaruh yang tidak signifikan.
4	Merang Kahar, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto	Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur	Tahun 2009 hingga 2014	Menggunakan model regresi linear berganda, pengujian hipotesis dengan uji regresi, uji korelasi, uji $R^2$ , uji asumsi klasik, uji F (uji serentak), dan uji T (uji parsial)	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan sektor kesehatan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur.
		Pengaruh pengeluaran pemerintah	Periode pengamatan 2001	Menggunakan pendekatan kuantitatif dan	Dari jumlah 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, kabupaten



		terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu	hingga 2012	analisis ekonometrik dengan SPSS 16	Rejang Lebong dan kota Bengkulu yang memiliki hasil bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Kabupaten Bengkulu Utara memiliki pengaruh yang negatif sedangkan 7 kabupaten lainnya memiliki hasil yang positif namun tidak signifikan.
6	Yosi Eka Putri, Syamsul Amar, Hasdi Aimon	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia	Tahun 2008 sampai 2012	Data panel dari 33 provinsi di Indonesia, menggunakan metode <i>simultaneous equation model analysis</i> dan <i>Indirect Least Squared (ILS)</i>	Variabel pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi dan IPM mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia secara signifikan. Artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi dan IPM akan menyebabkan peningkatan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
7	Nur Isa Pratowo	Analisis Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia	Tahun 2002 hingga 2009 di Provinsi Jawa Tengah	Menggunakan data panel dengan uji signifikansi, uji asumsi klasik, serta uji statistik berupa uji F ( <i>overall test</i> ), koefisien determinasi $R^2$ , dan uji T.	Belanja Daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Gini Rasio berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Proporsi Pengeluaran non Makanan, berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan



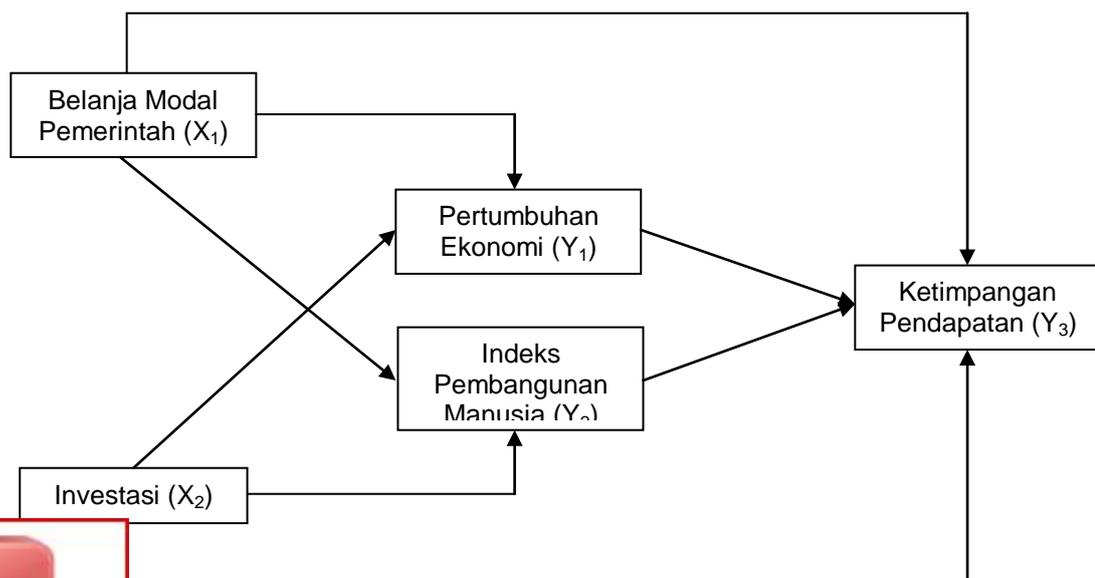
					Manusia. Rasio Ketergantungan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
8	Diah Pradnyadewi, Ida Bagus Putu Purbadharmaja	Pengaruh IPM, biaya infrastruktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali	Tahun 2008 hingga 2015	Penelitian ini berbentuk kuantitatif dan bersifat asosiatif, jenis data yang digunakan ialah data kualitatif dan kuantitatif dengan data sekunder. Metode pengumpulan data digunakan metode pengumpulan data observasi non partisipan dengan teknik analisis kuantitatif yaitu analisis jalur atau <i>path analysis</i> .	IPM berpengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, sedangkan biaya infrastruktur dan investasi tidak memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Biaya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung pada ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan IPM serta investasi tidak memiliki pengaruh pada ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali. IPM serta biaya infrastruktur memiliki pengaruh pada ketimpangan distribusi pendapatan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.



## 2.4 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang di hadapi Indonesia. Meskipun ketimpangan pendapatan di Indonesia menunjukkan tren yang menurun sejak semester 2 tahun 2014 tetapi ketimpangan pendapatan di Indonesia masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2017 *gini ratio* Indonesia sebesar 0,39. Selain itu, berdasarkan data dari *Credit Suisse*, Indonesia merupakan negara dengan ketimpangan kekayaan tertinggi ke dua setelah Thailand di kawasan Asia Tenggara tahun 2016. Tentu pemerintah terus berupaya dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Pemerintah perlu mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibentuk kerangka konseptual penelitian sebagai berikut.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian



## 2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disusun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Alokasi belanja modal pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia.
2. Investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) serta menganalisis pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) selama periode tahun 2006 sampai 2018.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data panel (*pooled data*) yaitu data gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dari tahun 2006 sampai tahun 2018 dengan data *cross sectional* yang diperoleh dari 6 provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data alokasi belanja modal, investasi swasta, laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan *gini ratio* masing-masing provinsi di Pulau Sulawesi. Data yang disusun adalah data tahun 2006 sampai 2018 yang bersumber dari BPS dan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya, untuk menunjang literatur serta wawasan, penulis menggunakan literatur tambahan yang didapat dari buku, jurnal, serta penelitian ilmiah lainnya.

